

KILAS KEBIJAKAN PSPK

Mendorong Keberlanjutan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Hasil Evaluasi Implementasi MBKM Mandiri di Perguruan Tinggi

*Bagaimana kita bisa melanggengkan kebijakan yang baik,
walaupun kepemimpinan terus berganti?*

Faris Hafizh Makarim

I. Rangkuman Eksekutif

Pergantian kabinet Indonesia setiap periode memiliki potensi perubahan kebijakan dari perubahan skala kecil hingga pergantian total, termasuk pengguguran usaha keras 4 tahun dalam membangun kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Maka dari itu, MBKM perlu menjadi budaya yang dinormalisasi di perguruan tinggi dalam bentuk implementasi MBKM di level perguruan tinggi secara mandiri, tidak bergantung kepada program *flagship* MBKM dari Kemdikbudristek.

Untuk itu, dalam 1 tahun terakhir masa jabatan, Kemdikbudristek dapat memaksimalkan pemberian:

1. **Insentif Finansial** bagi perguruan tinggi yang berencana/sedang mengembangkan program pembelajaran di luar kampus dengan durasi lebih dari 6 bulan (MBKM Mandiri).
2. **Dukungan Kemitraan** dengan institusi kelas nasional dan global bagi perguruan yang mengembangkan MBKM Mandiri dalam bentuk forum kemitraan, database platform digital, dan bentuk lainnya.
3. **Pengaruh ke Forum Strategis** yang dapat mempengaruhi pimpinan perguruan tinggi maupun program studi, seperti Forum Rektor Indonesia maupun asosiasi program studi sejenis.

II. Pengantar: Program *Flagship* MBKM Sebagai Capaian Penting dalam Implementasi Kebijakan MBKM

A. Tingginya Popularitas dan Dampak Program *Flagship* MBKM

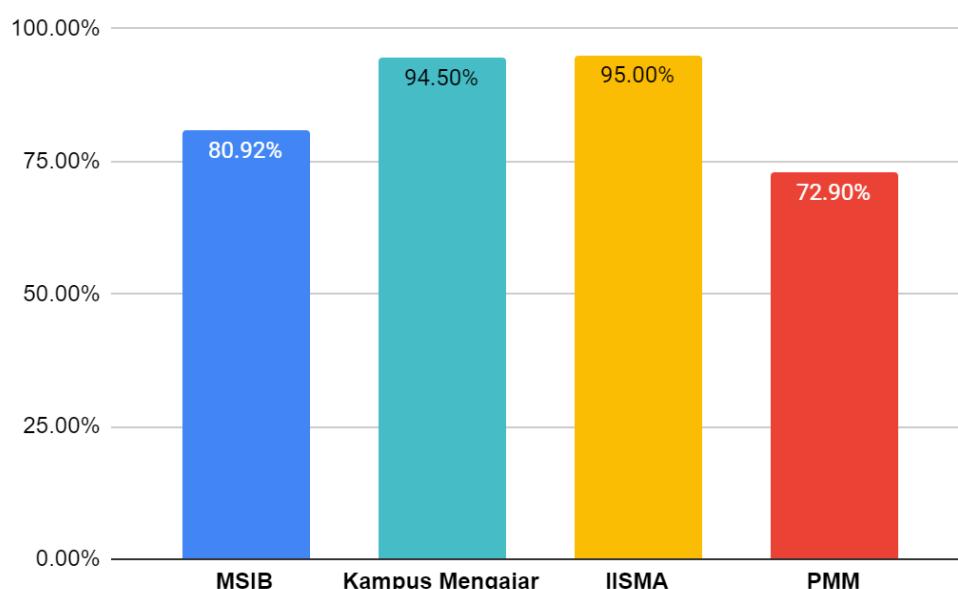
Mahasiswa memiliki hak untuk berkegiatan minimal 2 semester di luar kampus dan 1 semester di luar program studi, inilah kebijakan MBKM yang telah disosialisasikan pada Merdeka Belajar Episode 2: Kampus Merdeka. Dengan investasi sebesar Rp1.9T pada tahun 2022 dan Rp2.1T pada 2023 (Whafir, 2023), Kemdikbudristek membuat program-program *flagship* MBKM yang berniat menjadi pemantik perguruan tinggi untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM.

Program-program tersebut adalah International Student Mobility Awards (IISMA), Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM), Kampus Mengajar (KM), Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), dan Wirausaha Merdeka. Pada tahun 2022 jumlah peserta dari program *flagship* MBKM sebanyak 113.498 peserta atau sekitar 1.21% dari total mahasiswa Indonesia (Rizaty, 2023), yang melebihi target saat perencanaan yaitu 96.873 peserta (Whafir, 2023). Angka peserta yang melebihi target menandakan tingginya antusiasme mahasiswa untuk mengikuti program.

Tingkat kepuasan peserta MBKM juga dinilai cukup tinggi, terutama pada program Kampus Mengajar dan IISMA. Alumni-alumni IISMA juga banyak membuat perkumpulan sesama alumni IISMA, khususnya di perguruan tinggi tempat penempatannya di luar negeri. Hal ini menandakan adanya kebanggaan para alumni atas pengalaman yang mereka miliki.

Tingkat kepuasan yang tidak terlalu tinggi pada PMM (72.90%) disebabkan karena perguruan tinggi lokasi penempatan ternyata diberikan kepada peserta PMM secara acak sehingga peserta tidak terlalu puas dengan pemilihan perguruan tinggi. Meskipun begitu, secara konsep mahasiswa menyukai pembelajaran di luar kampus.

Tingkat Kepuasan Peserta Program Flagship MBKM



Gambar 1: Tingkat Kepuasan Peserta pada Program *Flagship* MBKM (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, 2022)

Selain itu, program *flagship* ini juga terbukti memberikan dampak kepada pengembangan diri mahasiswa. Pada program MSIB, 45.06% peserta merasa mengalami penambahan hard skill yang berkaitan dengan tempat magang, 35.22% untuk kepercayaan diri, dan 22.04% untuk kemampuan komunikasi (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, 2022). Minat yang terlihat dari para mahasiswa dan dampak yang terjadi ini telah memunculkan dorongan dari sisi mahasiswa agar program seperti *flagship* MBKM dapat terus menerus diadakan.

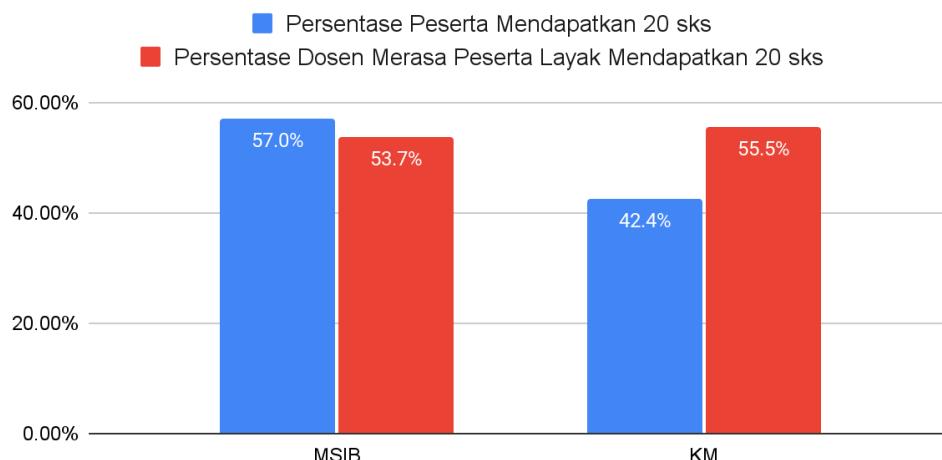
Selain itu, program *flagship* MBKM telah berhasil memberikan representasi yang jelas terkait bagaimana bentuk implementasi kebijakan MBKM yang ideal dari sudut pandang Kemdikbudristek, yang telah memberikan inspirasi kepada perguruan tinggi.

B. Perguruan Tinggi Belum Beradaptasi dengan Sempurna terhadap Kebijakan MBKM

Meskipun program *flagship* memiliki kepuasan peserta yang tinggi, ditemukan adanya permasalahan dalam hal pengakuan sks dari perguruan tinggi masing-masing peserta. Idealnya peserta yang mengikuti program *flagship* MBKM akan mendapatkan 20 sks karena kegiatan tersebut dilakukan selama 1 semester penuh. Namun, dari responden peserta Kampus Mengajar, hanya 42.4% peserta yang mendapatkan 16–20 sks. Selain itu, dalam program MSIB, hanya 57% peserta yang mendapatkan pengakuan 20 SKS, sementara masih ada 15% peserta yang tidak dijanjikan konversi sks dari PT.

Fenomena ini selaras dengan survei yang dilakukan kepada dosen-dosen, dimana hanya 53.7% dosen merasa peserta MSIB layak mendapatkan 20 sks dan 55.5% dosen yang berpendapat demikian untuk peserta Kampus Mengajar (KM).

Peserta yang Mendapatkan 20 sks dan Persepsi Dosen Terhadap Pengakuan sks pada MSIB dan KM



Gambar 2: Konversi sks pada MSIB dan Kampus Mengajar (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, 2022)

Selain persepsi dosen yang merasa peserta tidak layak mendapatkan konversi seharusnya, terdapat sebagian dosen yang merasa kesulitan secara teknis dalam mengkonversi sks, yaitu 45.3% dosen untuk MSIB dan 20.7% dosen Kampus Mengajar (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, 2022). Beberapa keluhan dosen dalam konversi sks, yaitu:

- kegiatan tidak sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan prodi,
- tidak ada mata kuliah yang sesuai dengan program MBKM untuk dikonversi,
- dosen tidak memahami kebijakan/aturan konversi sks,
- konversi terlalu banyak sehingga akan mengakibatkan mata kuliah yang penting tidak terambil.

Dari permasalahan konversi sks ini, dapat diambil kesimpulan bahwa perguruan tinggi belum melakukan adaptasi yang sempurna terhadap kebijakan MBKM, namun program *flagship* telah memberikan dorongan awal bagi perguruan tinggi untuk mengubah sistemnya masing-masing, seperti membuat kebijakan

khusus terkait konversi sks, penambahan mata kuliah MBKM di kurikulum masing-masing, maupun pembuatan tim khusus MBKM di masing-masing perguruan tinggi. Meskipun begitu, apakah perubahan tersebut cukup untuk tetap mempertahankan MBKM walaupun terjadi pergantian kabinet pemerintahan Indonesia?

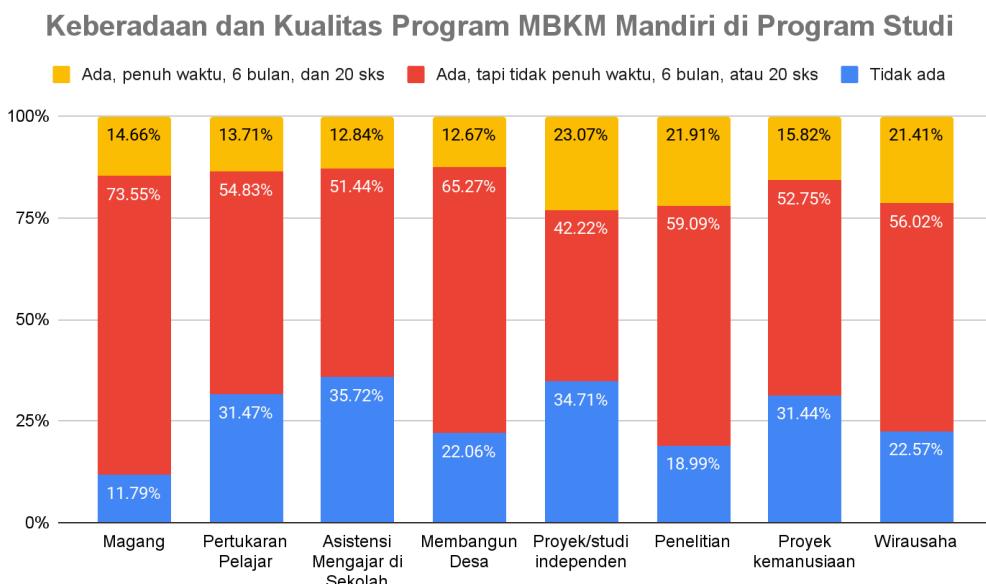
III. MBKM Mandiri sebagai Kunci Keberlanjutan Kebijakan MBKM

Pada dasarnya, perubahan yang terjadi pada birokrasi perguruan tinggi maupun kurikulum disebabkan karena pengaruh eksternal, yaitu program *flagship* MBKM, dimana program studi didorong untuk memberikan 20 sks kepada para mahasiswa peserta program. Maka dari itu, jika program *flagship* tidak lagi diadakan, tidak ada lagi dorongan eksternal yang mengharuskan program studi untuk mempertahankan sistem MBKM yang telah dimiliki.

Hal ini akan berubah jika tetap ada mahasiswa yang meminta pengakuan 20 sks dari perguruan tinggi atas pengalaman belajar mereka di luar program studi. Maka dari itu, jika perguruan tinggi membuat sendiri program MBKM mereka masing-masing (MBKM Mandiri), kebijakan MBKM ini akan berlanjut walaupun program *flagship* MBKM yang dijalankan Kemdikbudristek tidak ada lagi.

A. Kondisi MBKM Mandiri di Perguruan Tinggi

Mayoritas program studi telah memiliki program pembelajaran di luar kampus masing-masing. Namun, hanya 12% s.d. 23% saja yang telah memenuhi standar kebijakan MBKM, yaitu diikuti mahasiswa secara penuh waktu, 6 bulan, dan diakui 20 sks.



Gambar 3: Keberadaan dan Kualitas MBKM Mandiri (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, 2022)

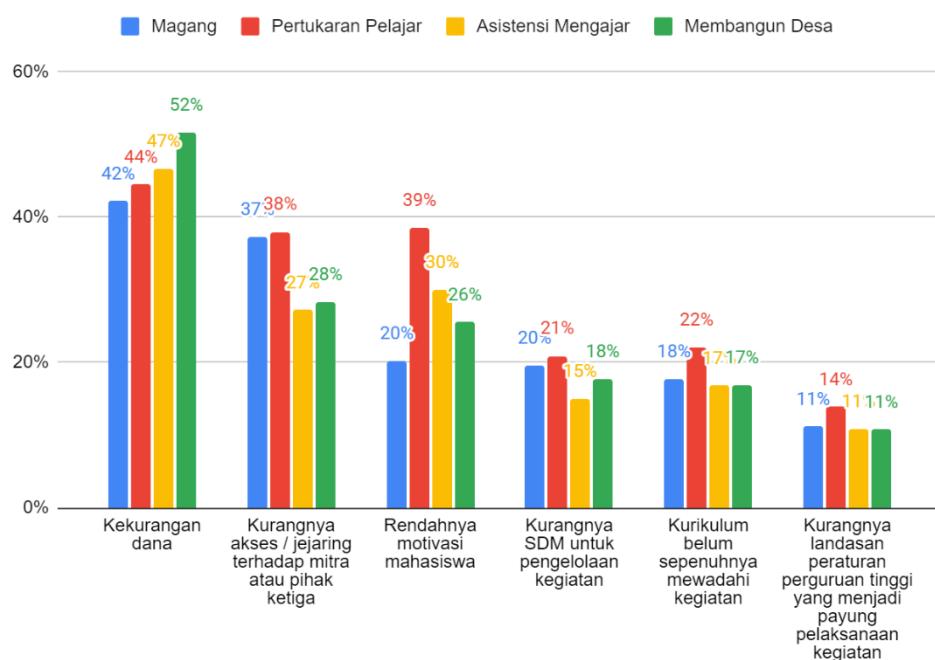
Dari prodi yang memiliki kegiatan MBKM Mandiri, sekitar 77% s.d.85% kepala prodi mengatakan bahwa alasan pembuatan kegiatan tersebut adalah karena keinginan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, 2022, 28). Hal ini agak berbeda dengan program *flagship* MBKM yang benar-benar membebaskan mahasiswa dari prodi apapun untuk mengikuti aktivitas luar kampus manapun. Walaupun penemuan-penemuan ini adalah kabar baik, tetapi butuh dilakukan penguatan terhadap program-program tersebut agar memenuhi standar MBKM.

B. Apa Hambatan Pelaksanaan dan Pengembangan MBKM Mandiri?

Kemdikbudristek dapat mendorong perkembangan MBKM Mandiri di perguruan tinggi dengan dua strategi, yaitu mendukung program MBKM Mandiri yang sudah ada dan membantu prodi yang belum memiliki program MBKM Mandiri untuk segera memulai.

Bagi prodi yang sudah memiliki kegiatan MBKM Mandiri (sudah maupun belum sesuai standar MBKM), ternyata hal yang paling menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya dana (42%-52%). Dari survei lanjutan, ternyata hanya 10%-16% prodi yang memiliki anggaran yang memadai dalam melaksanakan program MBKM Mandiri, khususnya magang, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, dan membangun desa. Selama ini, alokasi dana terbesar adalah insentif untuk dosen pembimbing maupun tim implementer program. Kemitraan merupakan hambatan kedua dari pelaksanaan MBKM Mandiri (27%-38%). Dari hasil wawancara kepada kepala prodi, ternyata masih banyak mitra yang tidak mengerti dengan konsep program MBKM sehingga perguruan tinggi kesulitan untuk bermitra. Pada beberapa kasus juga masih ada mitra yang justru meminta dana yang mana memberatkan pihak perguruan tinggi.

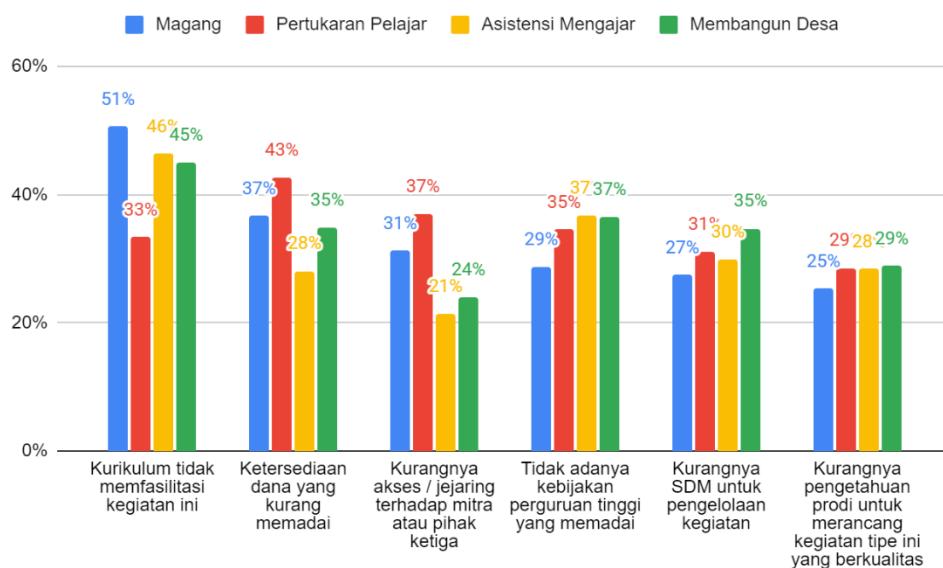
Apa saja kendala yang prodi Anda hadapi dalam melaksanakan kegiatan MBKM Mandiri?



Gambar 4: Kendala dalam Pelaksanaan Program MBKM Mandiri (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, 2022)

Pendanaan dan kemitraan ternyata menjadi permasalahan juga bagi prodi yang belum memulai program MBKM Mandiri dengan persentase responden dari kepala prodi masing-masing 28%-43% dan 21%-37%. Selain itu, ada satu permasalahan lain yang menjadi penghambat utama belum adanya program MBKM Mandiri di prodi-prodi tersebut, yaitu kurikulum yang belum memfasilitasi adanya kegiatan tersebut (33%-51%). Kurikulum merupakan hal yang dipengaruhi kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Maka dari itu, mendorong perguruan tinggi untuk membuat program MBKM mandiri akan memberikan dampak kepada program studi dalam perguruan tinggi tersebut. Selain itu, kurikulum juga dipengaruhi oleh asosiasi prodi sejenis, sehingga asosiasi prodi sejenis merupakan simpul yang strategis untuk diberikan pengaruh oleh Kemdikbudristek.

Apa saja penghambat bagi prodi Anda untuk memulai program MBKM Mandiri?



Gambar 5: Penghambat bagi Prodi yang belum Memiliki MBKM Mandiri

(Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, 2022)

IV. Rekomendasi

1. **Kemdikbudristek memberikan Insentif Finansial** bagi perguruan tinggi yang berencana/sedang mengembangkan program pembelajaran di luar kampus. Dengan memberikan insentif finansial, pemerintah dapat mendorong penyempurnaan program MBKM Mandiri yang telah ada, serta membuat prodi-prodi lain yang belum memulai pembuatan program MBKM Mandiri untuk segera memulainya. Insentif finansial dapat berbasis proposal dimana proposal pengembangan program MBKM Mandiri terbaik akan didanai. Konsep ini mirip dengan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM), namun fokus kepada MBKM Mandiri. Selain itu, melihat karakteristik pengembangan MBKM Mandiri selama ini, lebih baik pengembangan program MBKM Mandiri dilaksanakan dalam level perguruan tinggi dan sesuai dengan CPL dari prodi-prodi pada perguruan tinggi tersebut.

2. **Kemdikbudristek memberikan dukungan kemitraan** dengan cara menjembatani perguruan tinggi dengan institusi kelas nasional dan global. dalam bentuk forum kemitraan, database platform digital, dan bentuk lainnya. Kemdikbudristek dapat membuat forum-forum strategis seperti forum antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, kementerian dan lembaga pemerintahan, maupun dengan perguruan tinggi lainnya. Pembuatan forum ini simpel, namun strategis dan tidak mudah untuk dilakukan masing-masing perguruan tinggi.

3. **Pengaruh ke Forum Strategis** yang dapat mempengaruhi pimpinan perguruan tinggi maupun program studi, seperti Forum Rektor Indonesia maupun asosiasi program studi sejenis. Dengan memberikan pengaruh kepada forum pimpinan perguruan tinggi, Kemdikbudristek dapat mendorong komitmen setiap perguruan tinggi untuk mulai membuat MBKM Mandiri pada perguruan tinggi masing-masing, tentunya dengan iming-iming adanya insentif finansial yang dapat perguruan tinggi dapatkan. Selain itu, pengaruh kepada asosiasi program studi sejenis dapat memberikan dorongan kepada setiap program studi untuk memfasilitasi pembelajaran di luar kampus dan meyakinkan bahwa pembelajaran di luar kampus dapat mendukung mahasiswa untuk mencapai CPL masing-masing.

Daftar Pustaka

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. (2022). *Hasil Monitoring dan Evaluasi MBKM*

Dosen: Kampus Mengajar.

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. (2022). *Hasil Monitoring dan Evaluasi MBKM*

Dosen: Magang dan Studi Independen.

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. (2022). *Hasil Monitoring dan Evaluasi MBKM*

Program Flagship: IISMA.

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. (2022). *Hasil Monitoring dan Evaluasi MBKM*

Program Flagship: Magang dan Studi Independen.

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. (2022). *Hasil Monitoring dan Evaluasi MBKM*

Program Flagship: Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. (2022). *Hasil Monitoring dan Evaluasi MBKM*

Program non Flagship: MBKM Mandiri.

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. (2022). *Hasil Monitoring & Evaluasi MBKM*

Program Flagship: Kampus Mengajar.

Rizaty, M. A. (2023, February 14). *Jumlah Mahasiswa Indonesia Sebanyak 9,32 Juta*

Orang pada 2022. Data Indonesia. Retrieved May 26, 2023, from
<https://dataindonesia.id/Ragam/detail/jumlah-mahasiswa-indonesia-sebanyak-932-juta-orang-pada-2022>

Whafir. (2023, January 13). *Animo Sangat Tinggi, UGM Tandatangani Nota*

Kesepahaman Pengelolaan Program MBKM Tahun 2023. Universitas Gadjah Mada. Retrieved May 26, 2023, from <https://ugm.ac.id/id/berita/23361-animo-sangat-tinggi-ugm-tandatangani-nota-kesepahaman-pengelolaan-program-mbkm-tahun-2023>

Disclaimer:

Kilas kebijakan ini murni merefleksikan pandangan peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) berdasarkan hasil dari studi literatur dan keterlibatan langsung PSPK dalam proses evaluasi dan monitoring implementasi kebijakan. Kilas kebijakan ini ditulis dalam rangka memberikan informasi berbasis data terkait implementasi kebijakan terkait dan informasi yang tertera dalam dokumen ini dapat dikutip, disebarluaskan, dan dipergunakan untuk tujuan non-komersial.

Tentang PSPK:

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) merupakan yayasan non-profit independen yang berfokus pada penguatan kebijakan pembelajaran yang berpihak pada anak. PSPK berpijakan pada data ilmiah serta menyebarkan praktik baik di lapangan dalam ekosistem pendidikan Indonesia.

**Penulis:**

Faris Hafizh Makarim

Editor:

Fany Nasution

Desainer:

Wisnu Ari Susilo